

2026 LAPORAN KINERJA TRIWULAN I



PANGKALAN PSDKP JAKARTA

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu tahapan dalam siklus manajemen dalam sebuah organisasi, pelaporan mempunyai peran penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pencapaian tujuan dari organisasi. Fungsi pelaporan semakin penting seiring adanya kebijakan sistem anggaran berbasis kinerja dan berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah.

Memperhatikan hal tersebut, dan dalam rangka perwujudan *good governance* diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan serta saran yang telah ditetapkan.

Dengan adanya laporan kinerja (LKj) triwulan I tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan di Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta dalam melaksanakan program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan diharapkan dapat membuka pemikiran lebih kreatif dari berbagai pihak tentang bagaimana meningkatkan peran dan kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta masa yang akan datang.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan Negara tentu saja laporan kegiatan ini sangat terbuka terhadapsaran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Jakarta, 21 April 2026
Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta




Sigit Bintoro, S.Pi, M.Pi



— BAB I. —

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki 3 pilar utama dalam mewujudkan Laut sebagai Masa Depan Bangsa. Pencapaian ketiga pilar tersebut dilaksanakan melalui misi Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan. Ketiga misi tersebut dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang integral. Pilar kesejahteraan hanya bisa tercapai apabila pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara berdaulat dan berkelanjutan. Penjabaran ketiga misi tersebut dituangkan dalam program/kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja lingkup KKP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari KKP yang diberikan tugas dan fungsi melaksanakan misi Kedaulatan yakni dengan penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2025-2029.

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta (Pangkalan PSDKP Jakarta) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Ditjen. PSDKP dalam melaksanakan misi kedaulatan. Peran tersebut secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta 2025-2029.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya pengelolaan kinerja di KKP diatur melalui

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan pengukuran kinerja setiap triwulan dan melaporkannya secara rutin kepada Direktur Jenderal PSDKP.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) triwulan I tahun 2026 Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) triwulan I tahun 2026 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Pangkalan PSDKP Jakarta selama kurun waktu Januari – Maret 2026 dengan dasar hasil evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja pengawasan SDKP.

1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP Jakarta

Isu strategis Pengawasan SDKP terkait beberapa kebijakan, yakni :

- a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan (SDK) berbasis resiko;
- b. Pengawasan Sumber Daya Perikanan (SDP) berbasis resiko;
- c. *Destructive Fishing* berupa penggunaan bom, bius, dan penyetruman kerap terjadi di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta;
- d. Penangkapan, pengangkutan, dan distribusi jenis ikan yang dilindungi maupun yang masuk dalam ketentuan CITES tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah;
- e. Peredaran Benih Bening Lobster (BBL), kepiting, dan rajungan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020, khususnya terkait ukuran, kondisi, dan tata niaga;
- f. Pemanfaatan ruang laut yang belum dilengkapi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sebagai salah satu persyaratan dasar dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut di sektor kelautan dan perikanan.
- g. Pengawasan terhadap kegiatan reklamasi dan pemanfaatan ruang laut tanpa

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), termasuk pembangunan jetty, reklamasi pesisir, dan kegiatan usaha di wilayah pesisir yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan laut;

- h. Peningkatan pengawasan terhadap praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF), termasuk pengawasan kapal ikan asing ilegal serta kegiatan alih muatan ikan (transshipment) yang tidak sesuai ketentuan;
- i. Pengawasan implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, termasuk kepatuhan pelaporan hasil tangkapan, logbook penangkapan ikan, dan pengawasan pemanfaatan kuota penangkapan ikan;
- j. Pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir yang tidak sesuai ketentuan perizinan dan berpotensi mengganggu kelestarian ekosistem pesisir dan laut;
- k. Penguatan pengawasan berbasis teknologi melalui pemanfaatan Vessel Monitoring System (VMS), patroli terpadu, dan pengawasan digital untuk mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif dan responsif terhadap potensi pelanggaran.

Dengan adanya isu aktual tersebut diharapkan kegiatan Pangkalan PSDKP Jakarta selama tahun 2026 dapat mempunyai peran untuk meningkatkan tertib pelaksanaan perundang-undangan.

1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dalam hal wilayah kerja pengawasannya Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran pemantauan dan evaluasi, serta laporan;

2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan ;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tercantum pada pasal 6 ayat 1 yaitu susunan Organisasi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas :

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional adalah memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada gambar dibawah ini:

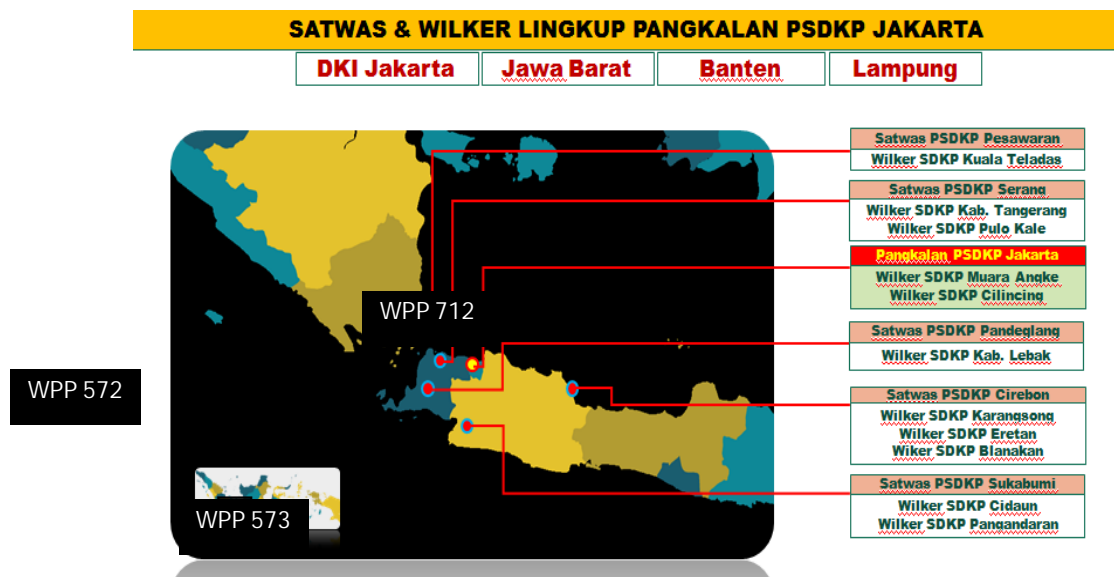
1.5 Wilayah Kerja

Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Pangkalan PSDKP Jakarta, merupakan *fishing ground* yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati, selain melaksanakan pengawasan

Gambar 1. Struktur Organisasi Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

dibidang penangkapan ikan juga menerima kapal yang ditangkap oleh kapal pengawas perikanan yang di kawal ke Pangkalan PSDKP Jakarta dari perairan ZEEI Samudera Hindia dan Perairan Laut Utara Jawa tersebar di satwas lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta.

Sebagai gambaran yang menunjukkan wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta, ditampilkan peta sebaran satwas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta mulai dari selatan Pulau Sumatera sampai Jakarta. Ditunjukkan pula mengenai sebaran Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang tersebar di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta yaitu WPP 712 mencakup Perairan Utara Jawa, WPP 572 meliputi Perairan Samudera Hindia Barat Sumatera dan WPP 573 Perairan Samudera Hindia Selatan Jawa. Berikut peta sebaran wilayah kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Peta sebaran wilayah kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta

Dalam melaksanakan operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta membawahi 5 Satuan Pengawasan. Satuan Pengawasan PSDKP tersebut dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 1. Pembagian Satwas SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

No	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	Kab. Administratif Kep. Seribu, Kota Administratif Jakarta Utara, Kota Administratif Jakarta Pusat, Kota Administratif Jakarta Timur, Kota Administratif Jakarta Barat, Kota Administratif Jakarta Selatan, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kota Bandung, Kab. Bandung Barat.
2	Satwas SDKP Pandeglang	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang
3	Satwas SDKP Pesawaran	Kab. Lampung Barat, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Utara, Kab. Mesuji, Kab. Pesawaran, Kab. Pesisir Barat, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Way Kanan, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kab. Pesisir Barat
4	Satwas SDKP Cirebon	Kab. Subang, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kota Cirebon
5	Satwas SDKP Sukabumi	Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kota Pangandaran
6	Satwas SDKP Serang	Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan

Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Selain melaksanakan pengawasan dibidang penangkapan ikan, Pangkalan PSDKP Jakarta juga melaksanakan pengawasan di bidang kelautan, budidaya, pengolahan dan distribusi hasil perikanan.

1.6 Armada Kapal Pengawas dan *Speedboat* Pengawas

Dalam melaksanakan kegiatan operasi pengawasan SDKP Pangkalan PSDKP Jakarta didukung 2 (dua) unit armada kapal pengawas, 6 (enam) unit *speedboat* pengawas dan 2 (dua) unit tipe RIB & *Rubber Boat*. Rincian armada kapal pengawas, *speedboat*, RIB & *rubber boat* dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Data Armada Kapal Pengawas

No	Nama Kapal	Ukuran Kapal	Tipe Kapal
1	Hiu 10	28 meter	Kelas IV
2	Hiu 06	28 meter	Kelas IV

Tabel 3. Data Armada Kapal Pengawas Tipe RIB & Rubber Boat

No	Nama Kapal	Lokasi	Ukuran Kapal
1	<i>Sea Rider</i>	Pangkalan PSDKP Jakarta	8 meter
2	<i>RIB</i>	Satwas SDKP Pandeglang	8 meter

Tabel 4. Data Armada Kapal Pengawas tipe Speedboat

No	Nama Kapal	Lokasi	Ukuran Kapal
1	Napoleon 006	Satwas SDKP Cirebon	12 meter
2	Dolphin 004	Satwas SDKP Serang	8 meter
3	Napoleon 014	Satwas SDKP Pesawaran	12 meter
4	Napoleon 052	Satwas SDKP Sukabumi	12 meter
5	Hiu Biru 03	Pangkalan PSDKP Jakarta	11 meter

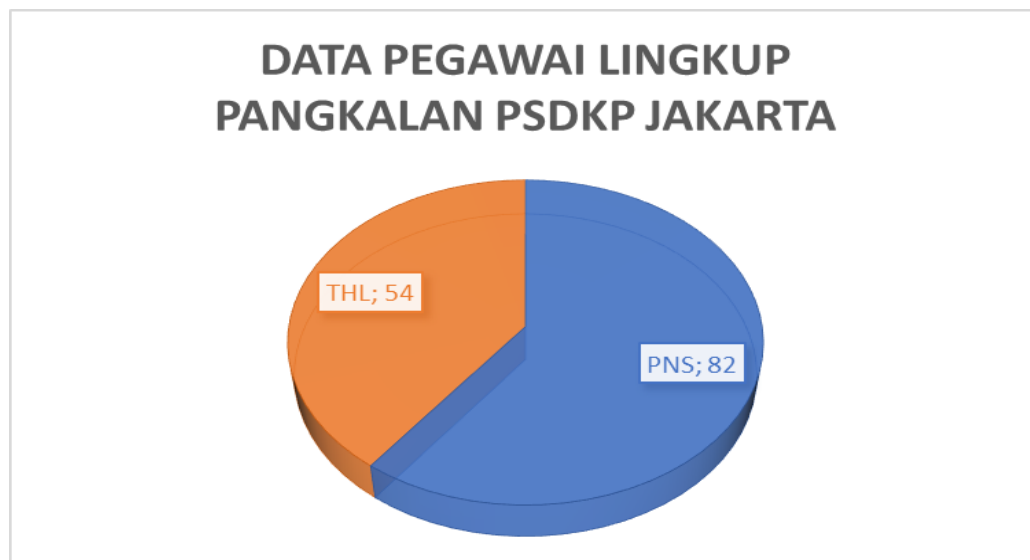
1.7 Kepegawaian

Sumber daya manusia Pangkalan PSDKP Jakarta selama tahun 2026 berjumlah 140 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 85 orang, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) berjumlah 55 orang. Data pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Data Pegawai Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

No	UNIT KERJA	Jumlah		TOTAL
		PNS Ditjen PSDKP	PPNPN	
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	35	33	70
2	AKP Kapal Pengawas	18	-	18
3	Satwas SDKP Pesawaran	5	3	8
4	Satwas SDKP Pandeglang	3	2	5
5	Satwas SDKP Serang	4	3	7
6	Satwas SDKP Sukabumi	6	6	10
7	Satwas SDKP Cirebon	10	8	18
8	CPNS	4	-	4
Jumlah		85	55	140

Komposisi pegawai Pangkalan PSDKP Jakarta, Satuan Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada grafik dibawah ini:

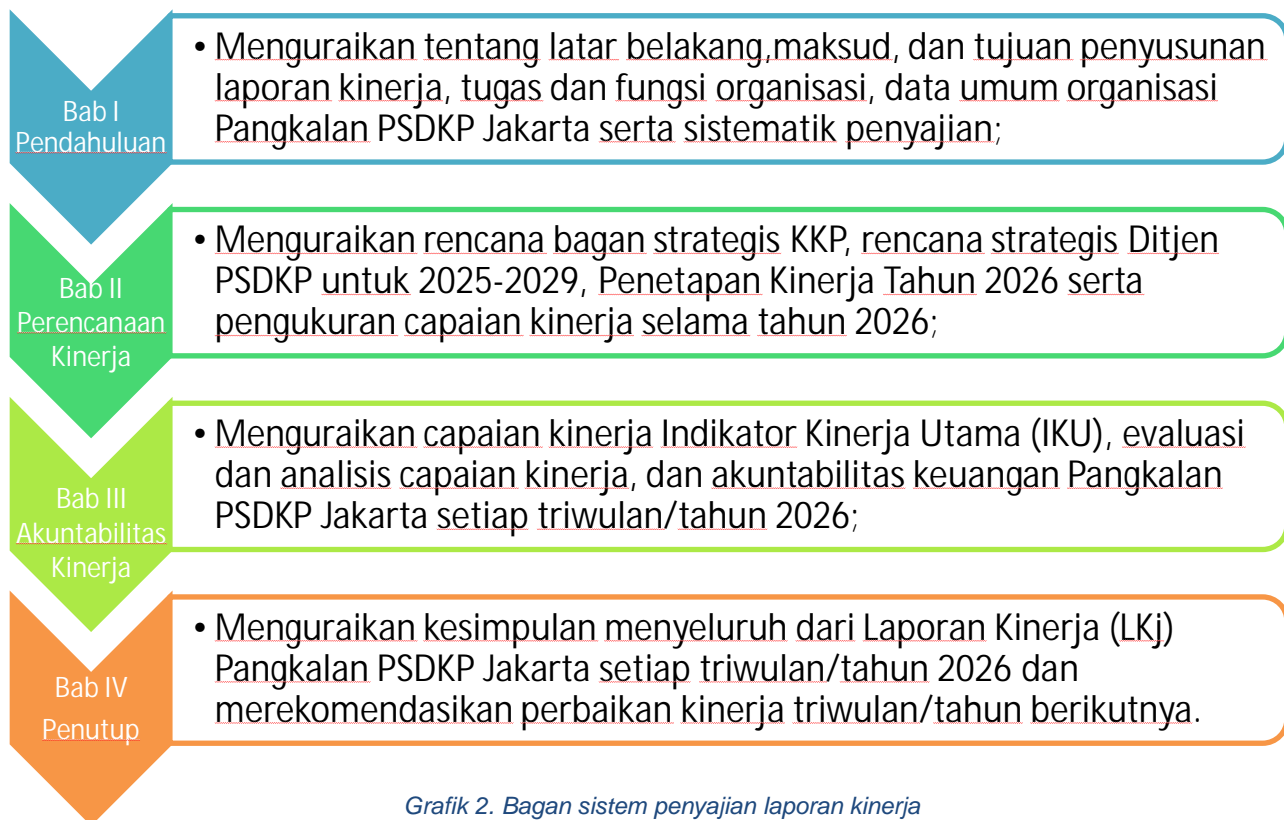


Grafik 1. Komposisi Jumlah Pegawai Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta

Dari data pada diatas menggambarkan komposisi pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang sebagian besar berstatus PNS dan sebagian berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai daerah dalam melaksanakan fungsi dan menyelesaikan tugas Pengawasan SDKP, diperlukan kesepakatan/aturan antara Dirjen PSDKP dengan Dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas pegawai tersebut serta meningkatkan kompetensi, dapat menugaskan pegawainya untuk mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan.

1.8 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika Penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2026 diuraikan pada grapik berikut :



Grafik 2. Bagan sistem penyajian laporan kinerja



DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN
DJKP



BAB II.

PERENCANAAN

“

*Perencanaan yang matang
adalah awal dari pelaksanaan yang berhasil.
Bersama nelayan, kita wujudkan
sektor kelautan dan perikanan yang
berkelanjutan dan berdaya saing.”*



Perencanaan
Terarah



Strategi
Berkelanjutan



Sinergi &
Kolaborasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Renstra Ditjen. PSDKP 2025-2029; ⁽²⁾ Renstra Pangkalan PSDKP Jakarta 2025-2029; dan ⁽³⁾ Penetapan Kinerja Tahun 2022.

2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2025-2029. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon III, Eselon IIII dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2025-2029 melalui 2 (dua) pendekatan yaitu *logical model* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas. Pada pendekatan *logical model*, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (*impact*), sasaran program (unit eselon I) yang menghasilkan (*Outcome*), dan sasaran kegiatan (unit eselon IV) yang menghasilkan keluaran (*output*). Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan tersebut, maka sasaran Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024 merupakan sasaran program dari program pengawasan SDKP, yaitu:

- a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP, dan
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang professional dan partisipatif

2.2 Rencana Strategis Pangkalan PSDKP Jakarta

Rencana sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2025-2029, merupakan penjabaran dari renstra Eselon I Ditjen

PSDKP, dengan tujuan yang akan dicapai, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta;
2. Tersedianya infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan sistem informasi dan komunikasi pengawasan SDKP;
3. Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta;
4. Terwujudnya ASN Pangkalan PSDKP Jakarta yang kompeten dan berkepribadian;
5. Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal dan mudah diakses di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta;
6. Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi Pangkalan PSDKP Jakarta yang berkepribadian;
7. Terkelolanya anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta secara efisien.

Untuk mencapai program kerja Pengawasan SDKP maka Pangkalan PSDKP Jakarta menetapkan tujuan yang akan dicapai, yaitu :

- a. Melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dari perusakan dan kegiatan *illegal*;
- b. Mewujudkan ketaatan para pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan;
- c. Terwujudnya industrialisasi perikanan.

Arah kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran lebih detail arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 khususnya pada kebijakan “membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan”. Sehingga kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, ditetapkan yaitu “Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna menegakkan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan”. Guna mewujudkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui 6 (enam) strategi *implementatif* yaitu :

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Regulasi

2. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan penguatan koordinasi dengan lintas institusi penegak hukum di laut
3. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (*Integrated Surveillance System/ISS*).
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan SDKP.
5. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

2.3 Rencana Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun Anggaran 2026

Program Pengawasan Pengelolaan PSDKP

A. Pemantauan dan Operasi Armada

1. Kinerja Operasi Kapal Pengawas
2. Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas
3. Pemenuhan Logistik Armada Pengawas SDKP
4. POKMASWAS yang Aktif Mendukung Pengawasan SDKP
5. Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP
6. Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan

B. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
2. Penyelesaian Penanganan Barbuk
3. Penyelesaian Penanganan Awak Kapal
4. Pengenaan Sanksi Administratif

C. Koordinasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

1. Jenis Ikan Yang Dilindungi Yang Diawasi Sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
2. Pelaku Usaha Pengelolaan Jasa Kelautan Yang Patuh Terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
4. Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut Nasional Yang Patuh terhadap

Peraturan perundang - undangan yang berlaku

5. Pelaku Usaha Perikanan Yang Bebas dari Destructive Fishing

D. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

1. Kapal Perikanan Yang Laik Operasional
2. Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
3. Unit Usaha Budidaya Ikan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
4. Usaha Distribusi Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang – undangan

E. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Taknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan)
3. Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta
4. Indeks Profesionalitas ASN
5. Nilai Rekonsiliasi Kinerja
6. Inovasi Gugus Kerja Transformasi
7. Kepatuhan Pengelolaan BMN
8. Kepatuhan Pengadaan/Barang Jasa
9. Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar
10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
11. Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

2.4 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2025 - 2029, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Perjanjian kinerja telah ditetapkan pada bulan Januari 2026. Berikut perjanjian kinerja yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas	83
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2	Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan	100
		3	Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan	100
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4	Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan	83
4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5	Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan	83
5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6	Indeks Operasi Kapal Pengawas	92,25
		7	Indeks Operasi Speedboat Pengawas	92,25
		8	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada Pengawasan SDKP	100
6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	82
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	82
7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	82
8	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Jakarta	81,75
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	92,1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
8	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	14	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	81,5
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Jakarta	88,2
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Jakarta	100%
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	86%
		18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	88,8
		19	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	80
		20	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	75
		21	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Jakarta	78
		22	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	71

2.5 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2026

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan Aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi khusus berbasis informasi teknologi.



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA



3.1 Capaian Sasaran Strategis Pangkalan PSDKP Jakarta

Berdasarkan implementasi dalam pengelolaan kinerja, Ditjen. PSDKP telah menyempurnakan dan menetapkan 8 (delapan) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai Rata-rata NKO diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh SK yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Kepala Pangkalan Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta dengan Direktur Jenderal PSDKP.

3.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2026

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2026 ditabulasikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2026

Perspektif/sasaran startegis/Indikator Kinerja		Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Capaian TW I 2026 (%)
SK.1.Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif					
IKU 1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	83	-	-	-
SK.2. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif					
IKU 2	Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan	100	-	-	-
IKU 3	Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan	100	-	-	-
SK.3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan					
IKU 4	Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan	83	50	93,26	120
SK.4. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan					
IKU 5	Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan	83	60	99,44	120
SK.5. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif					
IKU 6	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92,25	89	97,90	110
IKU 7	Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92,25	89	92,15	103

IKU 8	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada Pengawasan SDKP	100	-	-	-
SK.6. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan					
IKU 9	Indeks penenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	82	60	89,69	120
IKU 10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	82	65	79,88	120
SK.7. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan					
IKU 11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	82	-	-	-
SK.8. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan					
IKU 12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Jakarta	81,75	-	-	-
IKU 13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	92,1	-	-	-
IKU 14	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	81,5	-	-	-
IKU 15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Jakarta	88,2	-	-	-
IKU 16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	100	100	100	100
IKU 17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	86	86	86	100
IKU 18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	88,8	88,8	95,13	107
IKU 19	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	80	-	-	-

IKU 20	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	75	-	-	-
IKU 21	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Unit)	78	-	-	-
IKU 22	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	71	-	-	-

3.3 Analisis Pencapaian Kinerja

Sampai dengan tahun 2026 Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.3.1 Sasaran Kegiatan 1, Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif

Dalam rangka pencapaian SK “Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif”, Pangkalan PSDKP Jakarta telah mengidentifikasi IKU, sebagai berikut :

IKU 1 "Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)"

Kelompok Masyarakat Pengawas atau disingkat POKMASWAS adalah kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam mendukung kegiatan pengawasan SDKP. Pokmaswas merupakan mitra pengawas perikanan melalui laporan atau informasi adanya IUU Fishing di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta. IKU “Persentase POKMASWAS yang aktif yang mendukung pengawasan SDKP (%)” ini digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan SDKP.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas pada Triwulan I belum dilakukan pengukuran karena penilaian dilaksanakan secara akumulatif berdasarkan pelaksanaan kegiatan pembinaan selama satu tahun anggaran. Pengukuran indeks direncanakan akan dilakukan pada akhir tahun agar hasil penilaian dapat menggambarkan capaian kinerja secara menyeluruh dan objektif.

Alokasi anggaran untuk IKU “Persentase POKMASWAS yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%) sebesar Rp. 1.400.000.000,-. Kegiatan pembinaan POKMASWAS belum terlaksana dikarenakan masih menyesuaikan waktu dengan komisi DPR IV.

3.3.2 Sasaran Kegiatan 2, Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif

Dalam rangka pencapaian SK “Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif”, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan IKU, sebagai berikut :

IKU 2 "Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan”

Intelijen kelautan adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap

ancaman terhadap pengelolaan sumber daya kelautan. IKU “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan” adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, ketepatan, dan akurasi pelaksanaan kegiatan intelijen.

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dihitung karena pengukuran capaian indikator dilakukan pada akhir tahun anggaran. Penilaian dilakukan berdasarkan akumulasi pelaksanaan dan hasil kegiatan operasi intelijen kelautan selama satu tahun, sehingga pada Triwulan I belum terdapat realisasi capaian kinerja yang dapat disajikan.

IKU 3 "Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan"

Intelijen perikanan merupakan pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya perikanan.

IKU “Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan” merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur dan respon Pengguna dalam menindaklanjuti hasil intelijen, dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan.

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dihitung karena pengukuran capaian indikator dilakukan pada akhir tahun anggaran. Penilaian dilakukan berdasarkan akumulasi pelaksanaan dan hasil kegiatan operasi intelijen kelautan selama satu tahun, sehingga pada Triwulan I belum terdapat realisasi capaian kinerja yang dapat disajikan.

3.3.3 Sasaran Kegiatan 3, Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan” yaitu upaya pengawasan usaha kelautan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Berikut kegiatan yang mendukung sasaran kegiatan tersebut:

IKU 4 "Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan"

Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan adalah ukuran yang menggambarkan tingkat efektivitas, ketepatan, dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaku usaha kelautan. Pengawasan pelaku usaha kelautan merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator yang terdiri dari:

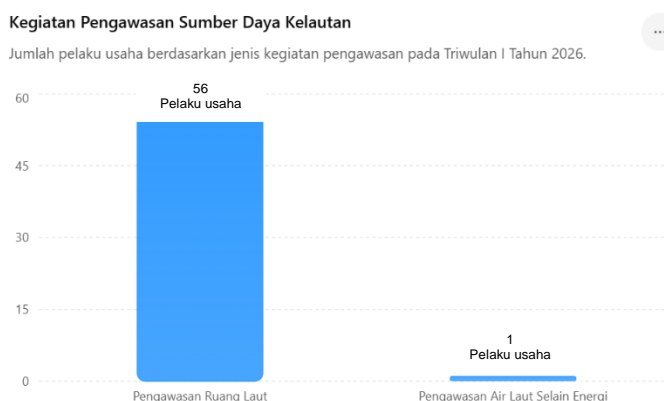
- a. nilai penyelesaian pengawasan OSS;
- b. nilai penyelesaian pengawasan selain OSS;
- c. nilai penyelesaian pengawasan insidental.

Hasil pengukuran kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian IKU "Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan", sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 8. IKU Nilai Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan

SUB IKU	TAHUN 2026			
	TARGET TAHUNAN	TARGET TW I	REALISASI	(%)
Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan	83	50	93,26	120

Berdasarkan tabel capaian IKU Tahun 2026, Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai dan melampaui target kinerja pada Indikator Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan. Dari target tahunan sebesar 83 dan target Triwulan I sebesar 50, realisasi yang diperoleh mencapai 93,26 sehingga capaian kinerja mencapai 120%. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan pada Triwulan I Tahun 2026 telah berjalan secara optimal dan efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pengawasan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta. Berikut grafik kinerja pengawasan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan:



Grafik 3. Rekapitulasi kegiatan pengawasan pelaku usaha kelautan

Berdasarkan grafik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan pada Triwulan I Tahun 2026, kegiatan Pengawasan Ruang Laut mendominasi pelaksanaan pengawasan dengan jumlah pelaku usaha yang diawasi sebanyak 56 pelaku usaha. Sementara itu, kegiatan Pengawasan Air Laut Selain Energi dilakukan terhadap 1 pelaku usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa fokus pengawasan pada Triwulan I lebih diarahkan pada kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya kelautan yang tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025, realisasi pada tahun berjalan tidak dapat dibandingkan secara langsung karena terdapat perbedaan nomenklatur serta manual IKU yang digunakan pada Tahun 2026. Perubahan tersebut menyebabkan adanya perbedaan indikator dan metode pengukuran capaian kinerja. Meskipun demikian, secara output pelaksanaan pengawasan menunjukkan peningkatan, dimana pada Tahun 2025 jumlah pelaku usaha yang diawasi sebanyak 23 pelaku usaha, sedangkan pada Tahun 2026 meningkat menjadi 57 pelaku usaha.

Alokasi anggaran untuk IKU “Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)” sebesar Rp 2,111,415,000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 133,709,767,- (6,33%). Realisasi anggaran masih rendah dikarenakan terdapat kegiatan yang anggarannya masih dalam proses pencairan.

3.3.4 Sasaran Kegiatan 4, Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan” yaitu upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Berikut kegiatan yang mendukung sasaran kegiatan tersebut:

IKU 5 " Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan”

Pengawasan sumber daya perikanan merupakan upaya pengawasan terhadap usaha perikanan/pemanfaatan sumber daya perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan sebelumnya. Pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat di bidang perikanan terdiri dari 1) pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsector perikanan dalam OSS, 2) pengawasan operasional kapal perikanan; 3) pengawasan importasi hasil perikanan; dan 4) pengawasan

pemanfaat sumber daya perikanan (illegal dan tindak lanjut aduan masyarakat).

Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha mencakup pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur dan tindak lanjut perbaikan pelaku usaha atas rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan, dalam rangka kepatuhan pelaku usaha perikanan. Penentuan nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Perhitungan IKU "Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan"

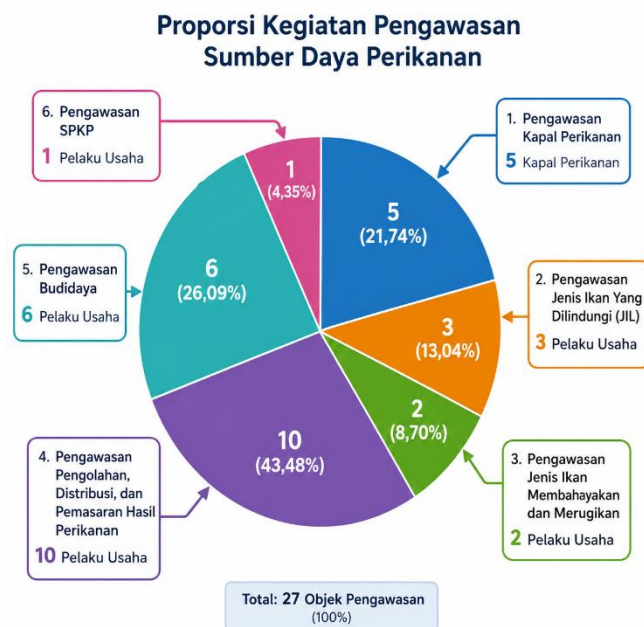
No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas dan/atau Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko)
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Perhitungan realisasi berdasarkan tahapan pemeriksaan yaitu persiapan, pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha dan penyusunan laporan hasil pengawasan yang ditembuskan kepada Direktur PPSDP. Pengawasan yang telah diperiksa dan sesuai dengan tahapan pemeriksaan akan memperoleh nilai 100. Target IKU ini sebesar 100, maka capaian yang didapatkan adalah 100%. Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan didukung adanya personal pengawas perikanan yang kompeten dan mendokumentasikan kegiatan pengawas langsung dihari yang sama pada grup *Whatsapp* Pangkalan PSKDP Jakarta.

Tabel 10. Rekapitulasi IKU “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan” triwulan I tahun 2026

SUB IKU	TAHUN 2026			
	TARGET TAHUNAN	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN(%)
Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	83	60	99,44	120

Berdasarkan tabel capaian IKU Tahun 2026, Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai dan melampaui target kinerja pada Indikator Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan. Dari target tahunan sebesar 83 dan target Triwulan I sebesar 60, realisasi yang diperoleh mencapai 99,44 sehingga capaian kinerja mencapai 120%. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya perikanan pada Triwulan I Tahun 2026 telah berjalan secara optimal dan efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pengawasan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta. Adapun lokasi pengawasan dilaksanakan di sekitar wilayah Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Berikut grafik kinerja pengawasan kegiatan pengawasan sumber daya perikanan:



Grafik 4. Proporsi Kegiatan Pengawas SDP

Berdasarkan grafik diatas pada Triwulan I Tahun 2026, kegiatan Pengawasan Pengolahan, Distribusi, dan Pemasaran Hasil Perikanan menjadi kegiatan dengan jumlah

objek pengawasan terbanyak yaitu 10 pelaku usaha atau sebesar 43,48% dari total objek pengawasan. Selanjutnya, kegiatan Pengawasan Budidaya sebanyak 6 pelaku usaha (26,09%) dan Pengawasan Kapal Perikanan sebanyak 5 kapal perikanan (21,74%). Sementara itu, Pengawasan Jenis Ikan Yang Dilindungi (JIL) dilakukan terhadap 3 pelaku usaha (13,04%), Pengawasan Jenis Ikan Membahayakan dan Merugikan terhadap 2 pelaku usaha (8,70%), serta Pengawasan SPKP terhadap 1 pelaku usaha (4,35%). Secara keseluruhan, total objek pengawasan yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 27 objek pengawasan yang menunjukkan pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan telah berjalan dengan baik dan mencakup berbagai sektor kegiatan perikanan.

Apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025, realisasi pada tahun berjalan tidak dapat dibandingkan secara langsung karena terdapat perbedaan nomenklatur dan manual IKU yang digunakan pada Tahun 2026. Perubahan tersebut menyebabkan adanya perbedaan indikator, ruang lingkup, serta metode pengukuran capaian kinerja sehingga hasil capaian antar tahun tidak dapat disandingkan secara setara.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar Rp 141.933.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 70.767.655,- (49,86%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 49,86% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien karena kegiatan pengawasan sudah dilaksanakan sesuai rencana dan adanya penggabungan kegiatan pengawasan UPI dengan pengawasan distribusi pada periode ini.

3.3.5 Sasaran Kegiatan 5, Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

IKU 6 “Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)”

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan (40%);

2. Cakupan wilayah pengawasan (40%);
3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (15%);
4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi (5%).

Berikut nilai dari setiap variabel pada kegiatan operasi kapal pengawas:

Tabel 8. Perhitungan Nilai Indeks Operasi Kapal Pengawas

Kapal Pengawas	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)	Hasil dan Tindak Lanjut Operasi (3%)	Dukungan Operasi Lainnya (2%)	Total Nilai Indeks per Kapal	Nilai per Satker
	TW I	TW I	TW I	TW I	TW I	TW I
	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
KP. HIU 10	50,00	45,00	1,50	1,4	97,90	97,90
KP. HIU 06	50,00	45,00	1,50	1,4	97,90	

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas Triwulan I Tahun 2026, kapal pengawas KP. HIU 10 dan KP. HIU 06 masing-masing memperoleh total nilai indeks sebesar 97,90. Nilai tersebut diperoleh dari komponen Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan sebesar 50,00, Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan sebesar 45,00, Hasil dan Tindak Lanjut Operasi sebesar 1,50, serta Dukungan Operasi Lainnya sebesar 1,40. Dengan capaian tersebut, nilai indeks per satker pada Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar 97,90 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi kapal pengawas telah berjalan dengan optimal dan mendukung keberhasilan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Berikut nilai indeks kinerja operasi kapal pengawas tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 9. Rekapitulasi Capaian IKU Indeks Kinerja Kapal Pengawas

SUB IKU	TAHUN 2026			
	TARGET TAHUNAN	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)
Indeks Kinerja Kapal Pengawas	92,25	89	97,90	110

Berdasarkan tabel capaian Sub IKU Tahun 2026, Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai dan melampaui target kinerja pada Indeks Kinerja Kapal Pengawas. Dari

target tahunan sebesar 92,25 dan target Triwulan I sebesar 89, realisasi yang diperoleh mencapai 97,90 dengan capaian kinerja sebesar 110%. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi kapal pengawas pada Triwulan I Tahun 2026 telah berjalan secara optimal dan efektif dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025, hasil IKU pada tahun berjalan tidak dapat dibandingkan secara langsung. Hal tersebut dikarenakan terdapat perubahan pada manual IKU, khususnya pada indikator dan metode perhitungan yang digunakan pada Tahun 2026 sehingga menghasilkan parameter penilaian yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas sebesar Rp 7,878,909,000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.851.196.301,- (74,26%). Realisasi anggaran untuk kegiatan operasi kapal pengawas sudah terealisasi meskipun secara perhitungan kinerja akan dilaksanakan pada akhir tahun.

IKU 7 “Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas”

Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni :

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- 2) Cakupan wilayah pengawasan;
- 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Tabel 10. Rekapitulasi Capaian IKU Indeks Kinerja Speedboat

SUB IKU	TAHUN 2026			
	TARGET TAHUNAN	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)
Indeks Kinerja Speedboat	92,25	89	92,15	104

Berdasarkan tabel capaian Sub IKU Tahun 2026, Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai dan melampaui target kinerja pada Indeks Kinerja Speedboat. Dari target tahunan sebesar 92,25 dan target Triwulan I sebesar 89, realisasi yang diperoleh mencapai 92,15 dengan capaian kinerja sebesar 104%. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi speedboat pada Triwulan I Tahun 2026 telah berjalan dengan baik dan efektif dalam mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Berikut nilai indeks kinerja operasi kapal pengawas tahun 2024, pada tabel dibawah ini :

Tabel 11. Perhitungan Nilai Indeks Operasi Speedboat

Nama Speedboat	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)	Hasil dan Tindak Lanjut Operasi (5%)	Total Nilai Indeks	Nilai per Satker (Rata-Rata)
	TW I	TW I	TW I		
	Nilai	Nilai	Nilai		
Dolphin 04	50,00	45,00	2,50	97,50	92,15
Napoleon 06	Belum Melaksanakan Operasi				
Napoleon 14	50,00	45,00	2,50	97,50	
Napoleon 52	Belum Melaksanakan Operasi				
Sea Rider/RIB	50,00	36,45	2,50	88,95	
Hiu Biru 03	50,00	32,14	2,50	84,64	
Rubber Boat	Belum Melaksanakan Operasi				

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kinerja Speedboat Triwulan I Tahun 2026, beberapa speedboat operasional telah berhasil mencapai nilai indeks yang baik dalam mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dolphin 04 dan Napoleon 14 masing-masing memperoleh total nilai indeks sebesar 97,50 yang berasal dari nilai Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan sebesar 50,00, Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan sebesar 45,00, serta Hasil dan Tindak Lanjut Operasi sebesar 2,50. Sementara itu, Sea Rider/RIB memperoleh nilai indeks sebesar 88,95 dan Hiu Biru 03 sebesar 84,64. Adapun speedboat Napoleon 06, Napoleon 52, dan Rubber Boat belum melaksanakan operasi pada Triwulan I Tahun 2026. Secara keseluruhan, nilai indeks rata-

rata per satker mencapai 92,15 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi speedboat telah berjalan dengan baik dan mendukung efektivitas pengawasan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta.

Apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025, hasil IKU pada tahun berjalan tidak dapat dibandingkan secara langsung. Hal tersebut dikarenakan terdapat perubahan pada manual IKU, khususnya pada indikator dan metode perhitungan yang digunakan pada Tahun 2026 sehingga menghasilkan parameter penilaian yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung IKU Indeks Kinerja *Speedboat* Pengawas sebesar Rp 455.925.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 102,718,120,- (22,53%). Realisasi anggaran untuk kegiatan operasi kapal pengawas sudah terealisasi meskipun secara perhitungan kinerja akan dilaksanakan pada akhir tahun.

IKU 8 “Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada Pengawasan SDKP”

IKU ini merupakan ukuran keberhasilan dalam mendukung terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif melalui pemeliharaan dan perawatan sarana serta prasarana pengawasan. Indikator ini diukur berdasarkan persentase keterlaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan sesuai dengan rencana kebutuhan pemeliharaan dalam satu tahun anggaran, guna menjamin kesiapan operasional sarana pengawasan yang berada di bawah kendali UPT Ditjen PSDKP.

Sarana pengawasan yang menjadi objek pengukuran meliputi Kapal Pengawas Kelas III, Kapal Pengawas Kelas IV, dan Kapal Pengawas Kelas V. Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan tersebut terdiri atas perawatan pencegahan/preventif sebesar 50%, perawatan prediktif sebesar 40%, dan perawatan darurat sebesar 10%. Melalui indikator ini diharapkan seluruh sarana pengawasan selalu berada dalam kondisi laik operasi dan laik laut sehingga mampu mendukung pelaksanaan pengawasan secara optimal.

IKU “Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada Pengawasan SDKP” Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat diukur karena penghitungan capaian indikator dilakukan pada akhir tahun anggaran. Hal tersebut dikarenakan penilaian dilakukan berdasarkan akumulasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan selama satu tahun, sehingga pada

Triwulan I belum terdapat realisasi capaian kinerja yang dapat disajikan.

Alokasi anggaran pada tahun 2025, untuk mendukung IKU Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP sebesar Rp 5.552.967.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.286.498.850,- (95,20%). Kegiatan ini juga dilakukan perhitungan kinerja pada akhir tahun sehingga secara kinerja belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.3.6 Sasaran Kegiatan 6, Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan

Dalam rangka pencapaian SK “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan”, Pangkalan PSDKP Jakarta telah mengidentifikasi IKU, sebagai berikut :

IKU 9 “Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan”

Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenalan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada :

- UPT PSDKP untuk pengenalan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- UPT PSDKP untuk pengenalan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Perhitungan jumlah pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan penjumlahan dari pengenalan sanksi administratif dibagi jumlah seluruh kasus pelanggaran administratif. Sampai dengan Maret 2026, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan pengenalan sanksi administratif atas pelanggaran SPKP sebanyak 169 kasus pelanggaran dan 2 kasus atas pelanggaran non SPKP. Sanksi administratif diberikan kepada pelaku usaha perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan dokumen perizinan melalui sistem pemantauan kapal perikanan. Kasus pelanggaran yang dilakukan kapal perikanan seluruhnya sudah di terbitkan Surat peringatan 1 (Satu).

Realisasi untuk IKU ini sebesar 89,69% sehingga capaian pada IKU ini sebesar 100% karna nilai indeks sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Tabel 11. Indeks peneanaan sanksi administratif triwulan I tahun 2026

SUB IKU	TAHUN 2026			
	TARGET TAHUNAN	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN(%)
Indeks peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	82	60	89,69	120

Berdasarkan tabel capaian IKU Tahun 2026, Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai dan melampaui target kinerja pada Indikator Indeks Peneanaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan. Dari target tahunan sebesar 82 dan target Triwulan I sebesar 60, realisasi yang diperoleh mencapai 89,69 sehingga capaian kinerja mencapai 120%. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan peneanaan sanksi administratif pada bidang kelautan dan perikanan telah berjalan secara optimal, efektif, dan sesuai ketentuan dalam mendukung kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta.

Apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025, realisasi Indeks Peneanaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2026 mengalami peningkatan. Pada Triwulan I Tahun 2025 realisasi tercatat sebesar 81 dengan capaian 120%, sedangkan pada Triwulan I Tahun 2026 realisasi meningkat menjadi 89,69 dengan capaian tetap sebesar 120%. Peningkatan realisasi tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan peneanaan sanksi administratif serta optimalisasi penegakan kepatuhan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 24.006.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.262.000,- (38,58%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 38,58% dapat disimpulkan penggunaan anggaran sangat efisien.

IKU 10 “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan”

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang

terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Perhitungan kegiatan ini. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b). Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Pada periode triwulan I tahun 2026, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan rekapitulasi kapal perikanan yang terindikasi pelanggaran berdasarkan surat dari Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada. Total kapal perikanan yang melanggar di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 169 kapal yang kemudian dilakukan pemanggilan untuk dimintai klarifikasi dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sampai dengan Maret 2026, pengawas perikanan telah melakukan klarifikasi sebanyak 135 orang/pelaku usaha. Realisasi untuk IKU ini sebesar 79,88% sehingga capaian pada IKU ini sebesar 120%. Berikut tabel perhitungan kegiatan Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan:

Tabel 12. Perhitungan Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Update 31 Maret 2026

NO	UPT	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)								ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT						Nilai capaian
		TRANSHIPMENT	PELABUHAN PANGKALAN	DPI	JALUR (<12 NM)	ZONA KONSERVASI	POACHING	SIPIEXPIRED	JUMLAH	DALAM PROSES	SUDAH	SURAT PEMANGGILAN	BUKAN PELANGGARAN	BAP	SP1	SP2	DENDA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Lampulo	0	0	6	8	0	0	0	14	3	11	4	0	7	0	0	0	78,57
2	Batam	0	0	0	27	0	0	0	27	0	27	17	0	5	3	2	0	100,00
3	Jakarta	0	8	45	102	1	13	0	169	34	135	45	23	40	21	0	6	79,88
4	Benoa	0	2	9	15	3	2	0	31	2	29	13	5	5	6	0	0	93,55
5	Bitung	0	0	7	17	1	0	0	25	12	13	8	0	4	1	0	0	52,00
6	Tual	0	2	0	9	2	0	0	13	0	13	9	1	2	1	0	0	100,00
7	Cilacap	0	1	98	77	1	3	0	180	8	172	67	7	96	0	0	2	95,56
8	Belawan	0	0	0	14	1	0	0	15	0	15	1	0	13	1	0	0	100,00
9	Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10	Pontianak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
11	Tarakani	0	0	3	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	2	1	0	100,00
12	Tahuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
13	Ambon	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	100,00
14	Biak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Total		0	13	168	270	9	18	0	478	59	419	164	36	172	36	3	8	87,66

Tabel 13. Hasil Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan triwulan I tahun 2026

SUB IKU	TAHUN 2026			
	TARGET TAHUNAN	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN(%)
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	82	65	79,88	120

Berdasarkan tabel capaian IKU Tahun 2026, Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai dan melampaui target kinerja pada Indikator Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dari target tahunan sebesar 82 dan target Triwulan I sebesar 65, realisasi yang diperoleh mencapai 79,88 sehingga capaian kinerja mencapai 120%. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan telah berjalan secara optimal dan efektif dalam mendukung kegiatan pengawasan serta pengendalian aktivitas kapal perikanan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta.

Apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025, realisasi Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2026 mengalami penurunan. Pada Triwulan I Tahun 2025 realisasi tercatat sebesar 81 dengan capaian 120%, sedangkan pada Triwulan I Tahun 2026 realisasi menjadi 79,88 dengan capaian tetap sebesar 120%. Penurunan realisasi tersebut disebabkan masih terdapat 34 kasus yang berada dalam proses penanganan. Selain itu, terdapat kendala dalam proses pemeriksaan dimana pihak yang dilakukan pemanggilan tidak mengindahkan surat pemanggilan dan tidak hadir untuk memenuhi proses pemeriksaan yang telah dijadwalkan.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 24.006.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.262.000,- (38,58%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 38,58% dapat disimpulkan penggunaan anggaran sangat efisien.

3.3.7 Sasaran Kegiatan 7, Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan

Dalam rangka pencapaian SK “Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan”, Pangkalan PSDKP Jakarta telah mengidentifikasi IKU, sebagai berikut :

IKU 11 “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)”

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang

bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan. Sampai dengan Maret 2026, tidak terdapat kasus tindak pidana dan kelautan di Pangkalan PSDKP Jakarta dan IKU akan dihitung pada akhir tahun.

3.3.8 Sasaran Kegiatan 10, Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP. Dalam rangka pencapaian SK “Tata Kelola Pemerintah yang Baik lingkup Ditjen PSDKP”, berikut beberapa IKU yang menunjang SK 10 :

IKU 12 “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Jakarta”

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk Menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

IKU “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Jakarta ini dihitung pada akhir tahun sehingga pada triwulan I belum ada realisasi. Kegiatan ini didukung dengan anggaran penataan organisasi dan tata Kelola.

IKU 13 “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta”

Capaian kinerja IKU “Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Pengukuran IK Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran meliputi 8 (delapan) indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain :

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
- c. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Pada periode triwulan I, Pangkalan PSDKP Jakarta akan melaksanakan IKU “Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” pada triwulan IV atau akhir tahun.

IKU 14 “Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)”

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP. Pengukuran kegiatan ini dilakukan setiap semester sehingga belum ada perhitungan pada periode ini. Berdasarkan IK yang digunakan Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu : (1) Kualifikasi; (2) Kompetensi; (3) kinerja; dan (4) Disiplin. Pengukuran kinerja ini dilakukan pada akhir tahun 2023. beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian IK ini antara lain:

- a. Melakukan update data SDMA yang terdapat dalam aplikasi Simpeg meliputi data pendidikan, pelatihan dll.
- b. Monitoring dan evaluasi secara berkala tingkat kehadiran pegawai PSDKP melalui finger print online.
- c. Monitoring dan Evaluasi pengisian capaian kinerja Output individu pada Aplikasi E-SKP

d. Pembinaan pegawai pada Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta.

IKU 15 “Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)”

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai) akan dilaksanakan pada triwulan III atau IV tahun 2025.

IKU 16 “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Jakarta”

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Pada triwulan I tahun 2025, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan pengendalian manajemen risiko yang dituangkan dalam form pengendalian dan

pemantauan risiko. Rencana pengendalian risiko sebanyak 18 dokumen. Dokumen tersebut telah terpenuhi sebanyak 10 dokumen setiap triwulan dan disampaikan kepada tim SPIP, sehingga didapatkan capaian IKU ini sebesar 100%.

Tabel 14. Hasil Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan triwulan I tahun 2026

SUB IKU	TAHUN 2026			
	TARGET TAHUNAN	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN(%)
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Jakarta	100	100	100	100

Apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025, realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Jakarta pada Tahun 2026 menunjukkan hasil yang tetap konsisten. Pada Triwulan I Tahun 2025 maupun Tahun 2026, realisasi yang diperoleh sama-sama mencapai 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mempertahankan kinerja pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko secara optimal dan konsisten dalam mendukung tata kelola organisasi yang baik.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 24.006.000,- , dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.262.000,- (38,58%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 38,58% dapat disimpulkan penggunaan anggaran sangat efisien.

IKU 17 “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup

Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” Capaian kinerja IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)”. Berdasarkan capaian IKU 17 “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja”, target kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 telah tercapai. Pada periode tersebut tidak terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal KKP kepada Pangkalan PSDKP Jakarta. Sesuai dengan manual IKU, bagi satuan kerja yang tidak memiliki rekomendasi hasil pemeriksaan Itjen KKP, maka pengisian capaian IKU menggunakan nilai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 86%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja IKU tetap dinilai tercapai sesuai ketentuan yang berlaku.

IKU 18 “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)”

Indeks kepuasan masyarakat didapatkan dari nilai SKM yang dilaksanakan setiap triwulan sekali melalui aplikasi Susan KKP. Nilai SKM pada triwulan I tahun 2026 merupakan nilai IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)” yaitu sebesar 95,13 dengan capaian sebesar 107%. Berikut nilai kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta periode triwulan I tahun 2026 :

Tabel 15. IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO triwulan I tahun 2026

IKU	TARGET TAHUNAN	TAHUN 2026		
		TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	88,8	88,8	95,13	107

Berdasarkan tabel capaian IKU Tahun 2026, Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai dan melampaui target kinerja pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta. Dari target tahunan dan target Triwulan I sebesar 88,8, realisasi yang diperoleh mencapai 95,13 sehingga capaian kinerja mencapai 107%. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pangkalan PSDKP Jakarta telah berjalan dengan baik serta mampu memenuhi harapan dan tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta pada Tahun 2026 mengalami sedikit penurunan. Pada Triwulan I Tahun 2025 realisasi tercatat sebesar 95,33 dengan capaian 108%, sedangkan pada Triwulan I Tahun 2026 realisasi menjadi 95,13 dengan capaian 107%. Meskipun mengalami penurunan, perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan dan masih berada dalam kategori baik, sehingga tidak mempengaruhi kinerja pelayanan publik secara keseluruhan di lingkup Pangkalan PSDKP

Jakarta.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 24.006.000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.262.000,- (38,58%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 38,58% dapat disimpulkan penggunaan anggaran sangat efisien.

IKU 19 “Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta”

Unit kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Penilaian mencakup komponen pengungkit (pemenuhan dan reform) dan komponen hasil (Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel dan Pelayanan Publik Yang Prima) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi zona integritas ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah.

Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,0;
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15;
5. Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal KKP.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Unit Kerja

Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada unit kerja lingkup Ditjen PSDKP memiliki target sebesar 80. Meskipun nilai minimal yang dipersyaratkan dalam penilaian WBK adalah 75, Pangkalan PSDKP Jakarta menetapkan target yang lebih tinggi sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengukuran capaian IKU ini akan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 kegiatan yang dilaksanakan masih berupa pemenuhan dan pengumpulan data dukung sebagai bagian dari persiapan penilaian WBK.

IKU 20 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta”

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pangkalan PSDKP Jakarta akan melaksanakan kegiatan “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” pada triwulan IV atau akhir tahun. Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

IKU 21 “Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Jakarta”

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi yang diterapkan adalah inovasi yang telah diterapkan pada unit kerja. Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan adalah hasil penilaian inovasi pelayanan public yang diterapkan dengan aspek Kebaruan/Nilai tambah, implementasi, signifikansi/dampak, adaptabilitas,

strategi keberlanjutan, sumber daya dan diseminasi.

Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan dihitung berdasarkan aspek aspek Kebaruan/Nilai tambah(15%) , implementasi (15), signifikansi/dampak (30), adaptabilitas (10), strategi keberlanjutan (10), sumber daya (5) dan diseminasi (15). Penilaian Inovasi Pelayanan Publik dinilai dan dituangkan dalam berita acara penilaian. Kategori nilai yaitu:

Nilai Predikat	Kategori Predikat
> 89 – 100	Sangat Memuaskan
> 80 – 89	Memuaskan
> 70 – 79	Sangat Baik
> 60 – 69	Baik
> 50 – 60	Cukup
> 30 – 50	Kurang
0 – 30	Sangat Kurang

Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut akan diukur pada akhir tahun anggaran dengan target nilai yang harus dicapai sebesar 78. Oleh karena itu, pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat realisasi capaian kinerja yang dapat disajikan. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode ini masih difokuskan pada pemenuhan dan pengumpulan data dukung sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan penilaian di akhir tahun.

IKU 22 “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)”

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Pangkalan, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.

Pada periode triwulan I, Pangkalan PSKDP Jakarta telah melaksanakan kegiatan implementasi budaya kerja secara berkala. Penilaian IKU “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)” akan dilaksanakan pada triwulan III atau triwulan IV sehingga realisasi pada triwulan I adalah pemenuhan data dukung kegiatan budaya kerja.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang dikelola Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar Rp. 34.214.897.000,- dan telah disahkan pada perjanjian kinerja tahun 2026 pada tanggal 5 Januari 2026.

Table 21. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta per Kegiatan sampai dengan Bulan Maret 2026

Kode	Kegiatan	Pagu	Realisasi Maret 2026	S/D	%
2350	Pemantauan dan Operasi Armada	Rp. 9,467,873,000	Rp. 1,186,176,931		12,53 %
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp. 327,683,000	Rp. 33,749,000		10,30 %
2352	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan	Rp. 1,567,797,000	Rp. 125,925,000		8,03 %
2353	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Perikanan	Rp. 102.725.000	Rp. 0		0 %
2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	Rp. 22,748,819,000	Rp. 5,329,696,563		23,43 %
	Total	Rp. 34,214,897,000	Rp. 6,675,547,494		19,51 %



— BAB IV. —
PENUTUPAN



4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKJ) periode triwulan I tahun 2026 menyajikan capaian kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta selama bulan Januari – Maret 2026. yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisa dan evaluasi untuk menilai keberhasilan dalam setiap triwulan berjalan dan triwulan sebelumnya. Pangkalan PSDKP Jakarta telah memenuhi seluruh target IKU yang ditentukan pada triwulan I dengan jumlah 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pangkalan PSDKP Jakarta sampai dengan Maret tahun 2026 sebesar 113,89.

4.2 Rekomendasi

Tidak ada permasalahan yang terjadi selama pemenuhan kinerja pada periode triwulan I sehingga tidak ada rekomendasi pada triwulan ini.